



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMBROSIUS SADAU**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **143365**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.387.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/465 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, Rp. 1.607.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 8.910 m2/180 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 58.400 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/177 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 58.400 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 320.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA-R Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.114.908.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	45.672.093
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.868.080.093
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.868.080.093

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.